

**PEMBUANGAN SISA LIMBAH AIR RAKSA DARI PENDULANGAN
EMAS TANPA PENGELOLAAN TERLEBIH DAHULU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Rico Ricardo

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Abstrak – Tercemarnya lingkungan hidup tidak lepas dari perbuatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan yang diperbuat manusia tanpa memperhatikan fungsi dari lingkungan hidup dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dan ekosistem didalamnya. Analisa kasus pembuangan sisa limbah air raksa tanpa pengelolaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh RI bertujuan untuk mengetahui Apakah RI yang membuang sisa limbah air raksa tanpa pengelolaan terlebih dahulu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan RI yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak melakukan pengelolaan telah memenuhi Pasal 103 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Air raksa yang dihasilkan oleh RI dalam proses mendulang emas di pinggir sungai tidak dikelola sehingga air raksa yang telah dihasilkan tersebut jatuh ke lingkungan hidup yaitu tanah maupun air. RI dapat dikenakan pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan RI yang tidak melakukan pengelolaan merupakan perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 103 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, RI telah berumur dewasa serta mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang tidak patut. Ketiga, RI memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu kelalaian karena RI seharusnya mengetahui bahwa tambang harus memiliki izin dan sebagai penambang harus memperhatikan limbah yang dihasilkan olehnya agar tidak terjadi pencemaran.

Kata Kunci : air raksa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanpa pengelolaan, limbah bahan berbahaya dan beracun.

**THE DISPOSAL WASTE OF MERCURY BY TRADITIONAL GOLD
MINING WITHOUT MANAGEABILITY VIEWED FROM THE LAW ON
THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT**

Rico Ricardo

Law Faculty, University of Surabaya

Abstract – The pollution of the environment can not be separated from human actions to manage and utilize the environment. Human environmental pollution done without regard to the function of the environment can cause environmental and ecosystem imbalance therein. Analysis of cases of disposal of waste mercury without management beforehand conducted by RI aims to determine disposing waste residue of mercury without management must first be accountable for the criminal viewed from the law on Protection and Environmental Management. RI's actions of generating hazardous and toxic waste and does not perform management have to comply with article 103 of Environmental Protection and Management law. Mercury produced by RI in the process of panning for gold in the river is not managed so mercury that has been generated is falling into the environment is soil and water. RI can be held accountable for having fulfilled the elements of criminal responsibility. First of all, RI are not managing a criminal act that is in violation of article 103 of Environmental Protection and Management Law. Secondly, RI is an adult and was aware that his actions was inappropriate. Third, RI has one form of error is negligence because of Indonesia should know that the mines must have a license and as miners must pay attention to the waste generated by it in order to avoid contamination.

Key words: Mercury , environmental protection and management , without management, hazardous and toxic waste.